



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SRIWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALFITRI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 655924

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.535.000.000

1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA INDRALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. Tanah Seluas 555 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 340.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V A/T MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOBIL, SUZUKI SEDAN Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 60.270.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 213.712.053

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.148.982.053

III. HUTANG

Rp. 205.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.943.482.053

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.